

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Oktober 2023/Khusus - Akhir Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BUDI IRAWANTO**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **166840**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.447.500.000**

1. Tanah Seluas 315 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 157.500.000
2. Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 64.800.000
3. Tanah Seluas 1978 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 791.200.000
4. Tanah Seluas 855 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 342.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/150 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 492.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/377 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m2/186 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 507.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPR2.4L DAKAR/JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
2. MOTOR, HONDA NC1183CA/T/SP.MOTOR SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, VESPA PIAGGIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 98.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.624.339.182
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.677.339.182
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.677.339.182

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.